

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdana menteri Marcorm Turnbull pada tahun 2018 melarang raksasa teknologi China yaitu Huawei untuk mengambil bagian dalam peluncuran infrastruktur seluler 5G karena dianggap mengancam keamanan nasional. Dalam hukum di Tiongkok organisasi dan warga negara diwajibkan untuk mendukung dan membantu pekerjaan intelijen. Hal ini memengaruhi analisis terkait peralatan Huawei dapat menjadi jalur spionase. Sikap yang ditunjukkan oleh menteri dalam negeri saat itu, Scott Morrison menjelaskan melalui pidatonya *"The Government will continue to engage and support Australians, including the telecommunications industry, to manage national security risks"*. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai adanya pelarangan terhadap Huawei tetapi pihak teknologi tersebut mengkonfirmasi pemerintah telah melarang Huawei (Slezak & Bogle, 2018). Meskipun tindakan pelarangan Huawei dianggap motif politik oleh China, namun bagi Australia pelarangan ini untuk melindungi kepentingan Australia dari masalah siber dan keamanan nasional. Khususnya mengenai proyek infrastruktur, penting untuk mempertimbangkan dalam melibatkan perusahaan internasional yang terikat dengan undang undang keamanan domestik (Cave & Uren, 2018).

Pada masa Covid-19 terjadi, Australia menjadi inisiator diplomatik untuk melakukan penyelidikan independen terhadap penanganan Tiongkok pada virus corona. Tiongkok dianggap telah melakukan kesalahan, kemungkinan besar dengan menyembunyikan informasi mengenai asal-usul virus dan tingkat penyebarannya

dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta negara-negara lain. Tiongkok menentang terkait adanya penyelidikan dan mengkritik sikap Australia karena dianggap menyudutkan Tiongkok, China pada akhirnya membalas sikap Australia melalui pembatasan perdagangan pada Mei 2020 (IISS, 2020).

Respon China atas sikap Australia dibalas melalui kebijakan bea antidumping pada ekspor jelai Australia sebesar 80%. China juga melarang ekspor daging sapi atas Australia dari empat rumah potong hewan karena masalah sertifikasi dan kesalahan pelabelan. Tidak hanya pada sektor perdagangan saja situasi ketegangan ini berdampak. China membangun narasi bagi warganya serta memperingatkan agar tidak mengunjungi dan melanjutkan studi di Australia karena masalah meningkatnya diskriminasi bagi etnis Tionghoa dan Asia (Tan, 2020).

Dalam perkembangan sengketa dagang yang terjadi, China tidak berhenti pada jelai dan daging sapi untuk merespon ketegangan hubungan kedua negara. *Wine* juga menjadi produk yang dihambat oleh China. Kebijakan bea antidumping sebesar 202,7% diperlakukan pada produk *wine* milik Australia yang pertahunnya China mengimpor sebesar 40% dari ekspor anggur Australia dengan nilai sebesar US\$ 1,2 miliar. Tidak berhenti pada produk makanan dan minuman, China melanjutkan pemblokiran pada produk ekspor Australia seperti batu bara, kapas, lobster dan produk kayu (Tan, 2020). Selain itu, dampak hubungan bilateral yang terjadi sejak masalah Huawei memengaruhi hubungan kedua negara dengan tidak aktifnya dialog ekonomi strategis yang dijalin oleh kedua negara sejak tahun 2018. Hingga pada tahun 2021 secara simbolis China menangguk semua kegiatan

tanpa batas waktu dengan Australia melalui kerangka kerja dialog ekonomi strategis (Laurenceson, 2021).

Sanksi ekonomi yang diberikan oleh China terhadap Australia memengaruhi dinamika politik Australia. Di bawah kepemimpinan Scott Morrison kebijakan luar negeri Australia berusaha untuk menghindari pemulihan hubungan dengan China dan justru berupaya untuk melawan pengaruh China. Sikap perlawanan Australia semakin kuat ketika persepsi negatif masyarakat yang terbentuk terkait koersivitas ekonomi yang dijalankan oleh China. Hal ini memengaruhi politisi Australia untuk tidak terlihat lemah dalam menghadapi China. Bagi Morrison tidak akan ada konsensi perbaikan hubungan dengan China sebelum adanya pencabutan pembekuan komunikasi antar-menteri karena akan dianggap sebagai kelemahan (Xue, 2023).

Australia juga membentuk kekuatan militernya dengan Amerika dan Inggris melalui AUKUS. Pembentukan pakta pertahanan ini adalah upaya melawan pengaruh China di wilayah Asia pasifik oleh Australia, Inggris dan Amerika. Ketika dibentuk pada 21 September 2021 bagi Amerika, Inggris dan Australia AUKUS merupakan entitas yang dirancang untuk mempertahankan tatanan internasional dan menjaga keamanan serta stabilitas di wilayah Indo-Pasifik (Chatham House, 2022). Merespon kerjasama tersebut bagi China AUKUS adalah produk ‘mentalitas perang dingin’, hal ini berpotensi merusak perdamaian, stabilitas regional dan dapat memicu perlombaan senjata serta memengaruhi dinamika geopolitik di wilayah Indo-Pasifik (Singh, 2021).

Pada tahun 2022 perdana menteri Australia dipimpin oleh Anthony Albanese yang berhasil memenangkan pemilu pada saat itu. Pada kepemimpinan Anthony Albanese terdapat perubahan kebijakan luar negeri terhadap China dengan menganggap China sebagai ancaman keamanan Australia namun di sisi lain China tetaplah mitra ekonomi bagi Australia. Ketegangan yang dialami oleh kedua negara berlangsung selama 4 tahun semenjak penolakan Huawei di tahun 2018, hingga di tahun 2022 pada saat pertemuan Xi Jinping dan Anthony Albanese pada KTT G20 di Bali dianggap sebagai tanda dalam mencairnya ketegangan yang terjadi antara hubungan diplomatik Australia dan China. Pada pertemuan tersebut Xi Jinping menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir hubungan kedua negara mengalami kesulitan dan perlu mengalami peningkatan pemeliharaan dan pengembangan. Meskipun pada pertemuan tersebut tidak secara eksplisit kedua negara akan kembali menjalin hubungan bilateral, namun sikap kedua pemimpin tersebut dapat menjadi tanda bagi hubungan China dan Australia kedepannya (Xiao, 2022).

Di tahun 2023 perdana menteri Australia Anthony Albanese mengunjungi China yang menjadikan adanya pemulihan dan optimisme terhadap hubungan bilateral antara kedua negara, selain itu kunjungan ini adalah pertama kalinya perdana menteri Australia mengunjungi China sejak tahun 2016. Pembahasan pertemuan tersebut berfokus pada isu perdagangan mengenai tariff impor Tiongkok atas Australia serta peningkatan akses sektor utama Australia. Baik Tiongkok dan Australia mengakui kedua negara saling bergantung dalam hal perdagangan ekonomi dan stabilitas regional. Arah kebijakan yang dijalankan oleh Anthony Albanese

menunjukkan titik balik perubahan yang positif bagi hubungan bilateral kedua negara dan tentu terdapat perbedaan yang signifikan dari perdana menteri sebelumnya Scott Morrison (Amir, 2023).

Pada penelitian terdahulu berjudul “Implikasi AUKUS Terhadap Hubungan Ekonomi Australia dan Tiongkok Tahun 2021-2022” yang dilakukan oleh Fajar Oktavianto menjelaskan mengenai hubungan ekonomi Australia dan China pasca terbentuknya AUKUS yang merupakan upaya Amerika, Inggris dan Australia untuk membendung pengaruh geopolitik China di Wilayah Indo-Pasifik (Fajar Oktavianto, 2023). Penelitian ini berfokus pada dinamika permasalahan ekonomi dan politik yang terjadi pada Australia dan China. Australia melakukan penolakan kerjasama Belt & Road Initiative di Victoria dan mencurigai penanganan China atas Covid-19 yang berpengaruh bagi hubungan perdagangan China dan Australia. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai AUKUS sebagai bentuk kekhawatiran yang terjadi pada Australia di wilayah Indo-Pasifik.

Terdapat penelitian lain mengenai “*Relations between Australia and China in Asia-Pacific Region. Case Study: China's Expansionism in Asia-Pacific*” (Nindyawati & Sholeh, 2020). Penelitian tersebut menjelaskan mengenai pengaruh China di wilayah Asia Pasifik dengan mendirikan Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara Pasifik, bahkan China menjadi negara donor yang cukup signifikan di wilayah Pasifik. Di lain hal Australia sebagai negara yang merasa sebagai wakil Amerika di wilayah Pasifik berusaha untuk mengimbangi China di wilayah Asia Pasifik, selain itu

Amerika juga mengkritik AIIB sebagai upaya kepentingan China untuk memenangkan konstelasi ekonomi dan politik internasional.

Pada jurnal yang berjudul “*Market adjustments to import sanctions: lessons from Chinese restrictions on Australian trade, 2020–21*” Victor, Scott dan Daren membahas mengenai dampak sanksi ekonomi yang diberikan oleh China kepada Australia (Ferguson et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa China tidak sepenuhnya memblokir ekspor Australia ke China, selain itu meskipun terdapat beberapa produk ekspor yang di blokir, namun Australia mampu melakukan diversifikasi pasar pada beberapa produk ekspornya seperti batubara yang dialihkan ke India, Jepang, Korea Selatan. Terdapat juga produk yang masih mengalami kesulitan dalam diversifikasi pasar seperti lobster, anggur, kayu gelondongan, dan barley.

Setelah meninjau dari penelitian sebelumnya, penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis akan membahas mengenai proses perubahan kebijakan atas Australia dan China sebagai bentuk normalisasi hubungan bilateral di bawah kepemimpinan perdana menteri Anthony Albanese.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yakni “Mengapa Australia kembali bekerjasama dengan China pada masa perdana menteri Anthony Albanese tahun 2021-2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum tujuan penelitian ini yakni untuk memberikan sumbangsih ilmu dan wawasan bagi para pembaca, masyarakat maupun khalayak umum melalui hasil penelitian atau karya ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan gelar Strata-1 atau Sarjana Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini secara khusus menganalisis penyebab Australia kembali bekerja sama dengan China dan membuat kebijakan luar negeri normalisasi hubungan dengan China khususnya pada saat pemerintahan perdana menteri Anthony Albanese.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Politik Luar Negeri

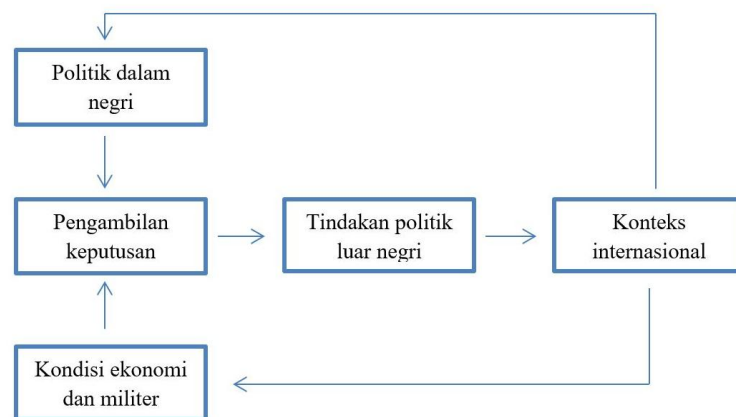
Tidak ada definisi yang secara pasti dalam pengertian dalam politik luar negeri karena ketidakjelasan bentuk atau wujud politik luar negeri. Namun terdapat 3 mekanisme yang lazim ditemukan dalam mendeskripsikan politik luar negeri, yaitu mekanisme dan sistem, lingkungan eksternal yang dinamis, serta tujuan yang ingin diraih. Politik luar negeri muncul dari mekanisme dan proses dalam sistem politik untuk menanggapi perubahan lingkungan eksternal serta memperjuangkan tujuannya. Ketiga hal tersebut pada umumnya merupakan definisi

keputusan politik. Asumsi dalam politik luar negeri adalah menyamakannya dengan politik dalam negeri atau kebijakan nasional bedanya terletak pada orientasi yang ditujukan pada aktor aktor internasional dan sebagai instrumen berinteraksi pada fora internasional (Wicaksana, 2007).

Menurut William D. Coplin kebijakan luar negeri merupakan hasil keputusan yang berkaitan dengan hubungan antar bangsa dan sebagai respon terhadap isu yang berkembang pada lingkup internasional (Coplin, 2003). Menurut Coplin determinan dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu konteks internasional, kondisi ekonomi dan militer, politik domestik dan pengambil keputusan.

Konteks internasional menjelaskan mengenai sistem politik internasional dimana negara melakukan hubungan kerjasama ekonomi dan politik. Pada hal tersebut Coplin menjelaskan 3 faktor yang membuat konteks internasional berpengaruh yaitu geografi, ekonomi dan politik. Geografi berhubungan dengan perilaku suatu negara yang dipengaruhi lingkungan disekitar wilayahnya. Kedekatan geografis yang memengaruhi perdagangan antarnegara, perilaku pemberian suara dalam PBB serta keanggotaan bersama organisasi antar pemerintah seperti organisasi regional, ketika menjadi penting bagi suatu negara, dapat memengaruhi kebijakan luar negerinya. Ekonomi menjelaskan mengenai arus barang dan jasa atau arus modal yang membuat suatu negara dapat bergantung dengan negara lain. Sementara politik menjelaskan hubungan politik suatu negara

dengan lingkungannya yang dapat memengaruhi keputusan politik luar negerinya. Ketika suatu negara beraliansi dengan negara lain, hubungan pada aliansi atau negara tersebut menjadi pertimbangan untuk memperoleh dukungan yang memengaruhi kebijakan luar negerinya



Gambar 1. 1 Pengambilan Kebijakan Luar Negeri
Sumber: William D. Coplin, 2003

Faktor kedua yaitu kemampuan ekonomi dan militer. Perkembangan ekonomi menjadi karakteristik berbagai negara yang memengaruhi kebijakan luar negerinya. Selain itu kemampuan suatu negara dalam memenuhi permintaan rakyatnya melalui jumlah produksi barang dan jasa yang dijelaskan melalui indikator GNP per kapita. Pada militer hal ini berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam membangun dan memelihara kekuatan ekonominya. Meskipun suatu negara memiliki kemampuan dalam memproduksi militer hal ini tidak memungkinkan suatu negara untuk bergantung pada negara lain khususnya bila berkaitan dengan dukungan bahan mentah dan logistik (Coplin, 2003).

Faktor ekonomi dan militer dalam politik luar negeri yang dijelaskan oleh Coplin tidak lepas dari faktor ideologis dan historis dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Pada negara maju kondisi ekonomi dan militer tidak akan mendorong dalam peperangan namun justru menghindari konflik dan digunakan untuk bekerja sama. Negara maju lebih mengutamakan peningkatan taraf hidup dan stabilitas ekonomi yang bergantung pada perdagangan internasional daripada peperangan. Namun bila negara maju mengalami permusuhan historis dan ideologis hal ini memengaruhi peluang terjadinya kerjasama cukup kecil. Negara maju yang dimaksud oleh Coplin adalah negara yang memiliki sistem persenjataan yang canggih serta efisien serta memiliki integritas ekonomi secara ekstensif. Negara maju juga memiliki kecenderungan meningkatkan hubungan perdagangan dan finansial tiap tahunnya.

Faktor ketiga adalah politik domestik. Pada politik domestik hal ini dipengaruhi oleh *policy influencer* yang kemudian dibagi menjadi 4 kategori kelompok yaitu *Bureaucratic Influencer*, *Partisan Influencer*, *Interest Influencer*, *Mass Influencer*. Sebelum menjelaskan mengenai 4 kelompok tersebut konteks domestik diawali dengan sistem pengaruh kebijakan yang dibagi menjadi sistem politik terbuka dan tertutup. Sistem politik terbuka memiliki karakteristik pemilihan yang bersifat kompetitif, terdapat dua atau lebih organisasi yang bertujuan menggantikan kepemimpinan dalam pemerintahan, terdapat toleransi pada kelompok independen dalam politik, terdapat kesepakatan konstitusional bagi penguasa pemerintah. Sistem

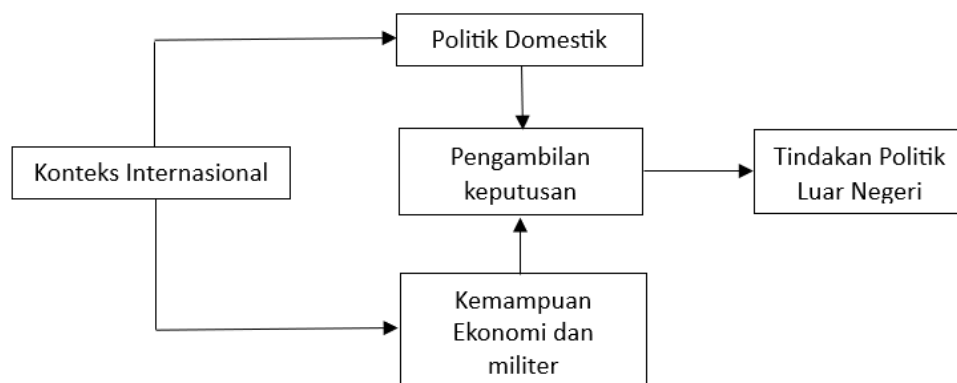
politik tertutup memiliki karakteristik memiliki suatu ideologi resmi, terdiri atas satu partai tunggal, penguasaan partai atas seluruh sarana komunikasi massa, alat persenjataan, dan seluruh arah perekonomian dikontrol dari pusat.

Bureaucratic Influencer yaitu merujuk pada individu atau organisasi pada lembaga eksekutif pemerintah dalam membantu pembuatan kebijakan oleh pengambil keputusan. Kelompok Ini berpengaruh karena memiliki akses langsung dan memberikan informasi kepada pengambil keputusan. *Partisan Influencer* yaitu mereka yang menyampaikan tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politisi menyangkut kebijakan pemerintah. Melalui influencer partai berbagai macam pandangan disampaikan dalam setiap isu dan dalam lembaga legislatif penyampaian isu tidak memandang garis garis kepartaian. *Interest Influencer* Sekelompok orang atau organisasi yang memiliki kepentingan yang sama hal ini bisa bersifat ekonomis ataupun tidak. Kelompok kepentingan berbeda dengan kelompok partai yang sifatnya menjadi jembatan 2 arah bagi masyarakat dan eksekutif. Opini publik atau , *Mass Influencer* yaitu iklim opini dalam masyarakat yang dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Dalam sistem demokrasi atau politik terbuka mass influncer dapat memperleh informasi atau dipengaruhi dari berbagai sumber penyajian informasi.

Keempat yaitu faktor *decision making* atau pengambil keputusan, pengambil keputusan merupakan aktor aktor yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan yang dihadapkan dengan situasi dari

berbagai determinan seperti kondisi politik domestik, kemampuan ekonomi dan militer dan konteks internasional. Coplin menjelaskan bahwa aktor akan menghasilkan citra (*image*) sebagai sikap yang dikembangkan seseorang dalam mempelajari lingkungannya. Pengambilan keputusan politik luar negeri dipengaruhi oleh motivasi seseorang yang membawanya pada posisi pengambil keputusan. Sikap yang dibuat oleh pengambil keputusan juga tidak lepas dari peran birokrasi politik luar negeri yang memberikan informasi bagi para pengambil keputusan mengenai lingkungan internasional agar dapat dipakai sebagai citra yang dibangun.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.2 Sintesa Pemikiran

Sintesa pemikiran tersebut adalah skema yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis tentang alasan Australia dalam melakukan normalisasi hubungan dengan China. Penulis menggunakan teori *Foreign Policy Decision Making* yang dijelaskan oleh William D. Coplin sebagai unit analisa pada studi kasus Australia dan China dengan 4 indikator yaitu konteks internasional, *decision maker*, politik domestik serta kondisi ekonomi dan militer. Melalui indikator yang ada, penulis berasumsi bahwa dari Kebijakan luar negeri Australia dipengaruhi oleh

faktor internasional khususnya hubungan bilateral antara China dan Australia yang memburuk. Hubungan bilateral memengaruhi faktor kondisi ekonomi dan militer serta berdampak pada dinamika politik dalam negeri Australia. Faktor faktor tersebut dapat memengaruhi pengambil kebijakan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Australia terhadap hubungan bilateral dengan China

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan konsep politik luar negeri, pada faktor internasional hal ini dipengaruhi oleh pengaruh China yang semakin luas di Pasifik, sanksi ekonomi yang memengaruhi kondisi ekspor dan politik domestik pertimbangan hubungan politik antara Australia dan Amerika dalam menjalin kerjasama dengan China. Konteks internasional tersebut memengaruhi kemampuan ekonomi dan militer Australia, yaitu beberapa sektor ekspor yang belum mampu melakukan diversifikasi ekspor, sedangkan militer Australia dekat dengan Amerika. Kedua negara memiliki ketergantungan ekonomi yang memengaruhi hubungan bilateral secara ekonomi dan militer dalam menjaga stabilitas geopolitik di wilayah Pasifik dengan menjalin kerjasama. Pada politik domestik hal ini dipengaruhi adanya permintaan kelompok bisnis, pengaruh kelompok partai buruh yang memiliki visi untuk menjalin kerjasama dengan China dan dukungan dari masyarakat dalam perbaikan hubungan. Pada dimensi pengambil keputusan ditunjukkan motivasi Albanese sebelum menjadi perdana menteri pada masa pemilu hingga merealisasikan kerjasama dengan China pada sektor ekonomi, serta kerjasama militer yang terbatas pada dialog strategis dalam menjaga stabilitas di wilayah Indo-Pasifik.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif dalam menganalisis peristiwa normalisasi hubungan Australia dan China. Penelitian eksplanatif adalah penjelasan mengenai hubungan suatu fenomena terhadap variabel. Penelitian ini menjelaskan dan mencari korelasi yang ada pada fenomena dan variabel sehingga menjelaskan mengenai sebab dan akibat pada suatu peristiwa (Hartono, 2019). Melalui tipe penelitian ini, penulis ingin menganalisis alasan normalisasi hubungan Australia terhadap China

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membatasi jangka waktu penelitian agar pembahasan topik tidak keluar dari fokus utama pembahasan. Oleh karena itu, penulis memberi jangkauan waktu tertentu, yakni dari tahun 2021 hingga 2023. Pemilihan tahun tersebut didasari oleh dimulainya masa pemilu untuk melihat motivasi sebelum menjadi perana menteri hingga munculnya kebijakan normalisasi dan kerjasama yang kembali dijalin oleh Australia dan China ketika ia menjabat sebagai perdana menteri.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu menggunakan data yang dikumpulkan dari sumber kedua. Data

sekunder merupakan data yang sebelumnya dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain untuk mendukung penelitian (Samsu. S, 2021). Selain itu, jenis data yang digunakan berupa sumber tertulis atau bahan bacaan, jurnal, laporan penelitian dan berbagai jenis literatur lainnya (Rahmadi, 2011). Dalam jenis data studi literatur penulis juga mengambil sumber dari media terpercaya seperti *ABC News*, *South China Morning Post*, *The Sydney Morning Herald* serta merujuk pada jurnal ilmiah yang kredibel seperti *Griffith Asia Institute* dan *International Institute for Strategic Studies*.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu memahami suatu fenomena dengan berbagai metode untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Secara historis penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yaitu pertama, menggambarkan dan mengeksplorasi. Kedua, menggambarkan dan menjelaskan. Kualitatif banyak menghasilkan penelitian deskriptif dan menjelaskan, sehingga kualitatif mampu memperkaya literatur melalui penggambaran tentang situasi yang kompleks dan memberikan pengarahan untuk penelitian selanjutnya (Saleh, 2017). Oleh beberapa kelompok atau individu penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami permasalahan sosial. Penelitian ini menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Kusumastuti & Khoirun, 2019). Melalui penelitian kualitatif dengan berbagai metode

untuk menjelaskan peristiwa, hal ini mampu mengintegrasikan bukti non-numerik menjadi analisis yang mendalam

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I berisi pendahuluan yang menjelaskan garis besar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka berpikir yang terdiri dari landasan teori, sintesa pemikiran, argument utama, dan metodologi penyajian dan pengumpulan data.

BAB II menjelaskan variabel konteks internasional yang berpengaruh terhadap kondisi politik domestik dan kemampuan ekonomi dan militer Australia pada masa kepemimpinan Anthony Albanese tahun 2021-2023

BAB III menjelaskan mengenai analisis aktor negara di bawah kepemimpinan Anthony Albanese yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan sehingga menghasilkan kebijakan politik luar negeri Australia di tahun 2021-2023

BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mulai BAB I hingga BAB III